



PENGARUH TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK), JUMLAH PENDUDUK, UPAH MINIMUM, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020-2024

Dwi Alviana^{1*}, Satarudin², & M. Jumaedi³

^{*1-3} Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Mataram

^{*e-Mail:} dwikalviana9@gmail.com

Submit Tgl: 02-Juli-2026

Diterima Tgl: 07-Juli-2026

Diterbitkan Tgl: 11-Juli-2026

Abstract: *Open unemployment remains one of the major challenges in regional economic development because it reflects the imbalance between labor supply and employment opportunities. This study aims to examine the effects of the Labor Force Participation Rate, population, minimum wage, and Human Development Index on the Open Unemployment Rate in West Nusa Tenggara Province during 2020–2024. This research employed a quantitative approach with an associative design using panel data regression analysis. The population consisted of all eight regencies and two municipalities in West Nusa Tenggara Province. A saturated sampling technique was applied, resulting in 50 observations. Secondary data were collected through documentation from the Central Bureau of Statistics and related institutions. The analysis included panel data model selection, classical assumption tests, hypothesis testing, and the coefficient of determination. The results indicate that population has a positive and significant effect on the Open Unemployment Rate, whereas the Labor Force Participation Rate, minimum wage, and Human Development Index have no significant partial effects. Simultaneously, all independent variables significantly affect the Open Unemployment Rate, with an explanatory power of 73 percent. In conclusion, open unemployment in West Nusa Tenggara is influenced by the combined interaction of demographic, labor market, wage, and human development factors, although population remains the most dominant determinant during the study period.*

Keywords: *Human Development Index, Labor Force Participation Rate, Minimum Wage, Open Unemployment, Population*

Abstrak: Pengangguran terbuka masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi daerah karena mencerminkan ketidakseimbangan antara ketersediaan tenaga kerja dan kesempatan kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, jumlah penduduk, upah minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif dan analisis regresi data panel. Populasi penelitian meliputi seluruh delapan kabupaten dan dua kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Teknik sampling jenuh menghasilkan 50 unit observasi. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan instansi terkait. Analisis data dilakukan melalui pemilihan model regresi data panel, pengujian asumsi klasik, uji hipotesis, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, upah minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dengan kemampuan model menjelaskan variasi sebesar 73 persen. Kesimpulannya, pengangguran terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Barat dipengaruhi oleh kombinasi faktor demografi, ketenagakerjaan, kebijakan pengupahan, dan pembangunan manusia, dengan jumlah penduduk sebagai faktor yang paling dominan selama periode penelitian.

Kata Kunci: Human Development Index, Labor Force Participation Rate, Minimum Wage, Open Unemployment, Population

Cara mengutip Alviana, D., Satarudin, & Jumaedi, M. (2026). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Jumlah Penduduk, Upah Minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2024. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 415–432. <https://doi.org/10.71456/sur.v5i1.2222>

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui transformasi ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan hasil pembangunan (Todaro & Smith, 2010). Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pemerataan distribusi pendapatan. Namun demikian, salah satu persoalan yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah tingginya tingkat pengangguran yang menghambat optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia dan pencapaian kesejahteraan masyarakat (Dewi Indriani, 2019).

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi permasalahan pengangguran. Berdasarkan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten/kota tahun 2020–2024, kondisi pengangguran di provinsi ini menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan tingkat yang berbeda antarwilayah. Pada tahun 2020, hampir seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan TPT akibat dampak pandemi *Covid-19* yang menekan aktivitas ekonomi. Pembatasan mobilitas masyarakat, penurunan aktivitas produksi, serta perlambatan sektor usaha menyebabkan berkurangnya permintaan tenaga kerja sehingga jumlah pengangguran meningkat. Walaupun pada tahun-tahun berikutnya TPT cenderung mengalami penurunan di sebagian besar daerah, beberapa wilayah perkotaan seperti Kota Mataram dan Kota Bima masih mencatat tingkat pengangguran yang relatif tinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia kerja belum sepenuhnya diimbangi oleh kemampuan perekonomian daerah dalam menciptakan kesempatan kerja yang memadai.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pengangguran tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, tetapi juga oleh karakteristik pasar tenaga kerja. Salah satu faktor yang diduga memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Menurut S. Mulyadi (2014), peningkatan TPAK akan memberikan dampak positif apabila diikuti dengan meningkatnya kesempatan kerja.

Sebaliknya, apabila pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dibandingkan kemampuan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja, maka jumlah pengangguran akan meningkat akibat terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia (Abdianti & Martilova, 2024). Dengan demikian, hubungan antara TPAK dan pengangguran sangat bergantung pada kemampuan perekonomian dalam menyediakan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang terus bertambah.

Selain TPAK, jumlah penduduk dan upah minimum juga merupakan faktor yang berpotensi memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka. Meningkatnya jumlah penduduk akan memperbesar jumlah angkatan kerja sehingga apabila penciptaan lapangan pekerjaan tidak mampu mengimbangnya, tingkat pengangguran akan meningkat (Purba et al., 2024). Pendapat tersebut diperkuat oleh Syam (2015) yang menyatakan bahwa peningkatan kepadatan penduduk dapat mendorong kenaikan tingkat pengangguran di suatu wilayah. Di sisi lain, kebijakan upah minimum ditetapkan pemerintah sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Namun, menurut Keynes, peningkatan kesempatan kerja hanya dapat terjadi apabila tingkat upah menurun, sedangkan tingkat upah yang terlalu rendah juga berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk bekerja (Badria, 2022). Oleh sebab itu, hubungan antara upah minimum dan pengangguran masih menjadi isu yang memerlukan pembuktian empiris.

Faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Soeharjato dan Oktavia (2021), IPM digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam perspektif teori *human capital*, investasi pada bidang pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas tenaga kerja tersebut diharapkan mampu memperbesar peluang penyerapan tenaga kerja sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka (Qamariyah et al., 2022; A. H. Salsabila et al., 2025). Meskipun demikian, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan temuan yang berbeda. Widiantri dan Sahri (2024) menemukan bahwa TPAK berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengangguran, jumlah penduduk berpengaruh negatif namun tidak signifikan, sedangkan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara itu, Salsabila et al. (2024) menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur, sedangkan TPAK tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pengangguran masih memerlukan kajian lebih lanjut pada konteks wilayah dan periode yang berbeda.

Berdasarkan fenomena, permasalahan, dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, jumlah penduduk, upah minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020–2024. Penelitian ini menjadi penting karena menggunakan periode pengamatan yang mencakup masa pandemi *Covid-19* hingga masa *post-pandemic*, sehingga mampu menggambarkan dinamika ketenagakerjaan pada kondisi yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis simultan empat variabel penentu pengangguran dengan menggunakan data periode 2020–2024 yang merepresentasikan perubahan kondisi ketenagakerjaan selama pandemi hingga setelah pandemi, sehingga diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih relevan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif yang bertujuan menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), jumlah penduduk, upah minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020–2024. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang memanfaatkan analisis statistik sebagai alat untuk mengolah data sehingga menghasilkan informasi dalam bentuk numerik (Sahir, 2022). Menurut Haradhan Marojahan (2020) dalam Waruwu et al. (2025), penelitian kuantitatif merupakan metodologi yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, perilaku, maupun variabel lainnya sehingga menghasilkan data numerik yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap populasi yang lebih luas. Sementara itu, metode asosiatif digunakan untuk menguji hubungan serta pengaruh antarvariabel dalam suatu penelitian.

Penelitian dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi delapan kabupaten dan dua kota dengan periode pengamatan tahun 2020–2024. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menunjukkan dinamika pengangguran yang fluktuatif selama periode pengamatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka setelah pandemi *Covid-19* menunjukkan kecenderungan menurun, namun masih memperlihatkan variasi antardaerah yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Barat relevan sebagai objek penelitian untuk menganalisis pengaruh TPAK, jumlah penduduk, upah minimum, dan IPM terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka.

Populasi penelitian mencakup seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu sebanyak 10 wilayah administratif yang terdiri atas delapan kabupaten dan dua kota. Penelitian menggunakan teknik *sampling* jenuh sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Dengan periode observasi selama lima tahun, yaitu tahun 2020–2024, diperoleh sebanyak 50 unit observasi yang dianalisis. Data yang digunakan merupakan data kuantitatif berupa data sekunder yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik, instansi pemerintah terkait, serta berbagai dokumen pendukung seperti buku, jurnal, skripsi, artikel ilmiah, dan sumber lain yang berkaitan dengan variabel penelitian (Kolkman & Blackburn, 2014).

Instrumen penelitian berupa data dokumentasi yang mencakup Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel dependen serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, jumlah penduduk, upah minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel independen. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi dokumentasi melalui pengumpulan, pengelompokan, dan penelaahan berbagai dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian (Nawawi, 2015). Teknik dokumentasi dipilih karena mampu menyediakan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian melalui berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan variabel penelitian (Sudjono, 2010).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak *EViews* 10. Data panel merupakan kombinasi antara data *time series* dan *cross section* sehingga mampu menjelaskan variasi data berdasarkan dimensi waktu dan wilayah. Tahapan analisis diawali dengan pemilihan model terbaik melalui uji Chow untuk menentukan model *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM), dilanjutkan dengan uji Hausman untuk memilih antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM),

serta uji *Lagrange Multiplier* (LM) untuk menentukan model yang paling sesuai antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM) (Widarjo, 2009; Ghozali, 2023; Mulia, 2023). Setelah model terbaik diperoleh, dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas menggunakan uji *Jarque-Bera*, uji multikolinearitas melalui matriks korelasi, dan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser (Basuki, 2017; Gujarati, 2006 dalam Side & Nurfitriah, 2019).

Prosedur penelitian dimulai dengan pengumpulan data sekunder sesuai periode penelitian, kemudian dilakukan penyusunan basis data panel berdasarkan kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2020–2024. Selanjutnya dilakukan estimasi model regresi data panel melalui tahapan pemilihan model, pengujian asumsi klasik, serta pengujian hipotesis menggunakan uji parsial dan uji simultan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen maupun pengaruhnya secara bersama-sama terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Tahap akhir penelitian dilakukan dengan menghitung koefisien determinasi untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sehingga diperoleh dasar dalam penyusunan interpretasi hasil penelitian (Gujarati, 2009; Basuki, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka Di NTB Tahun 2019 - 2024

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lombok Barat	3,52	4,58	3,32	4,16	3,12	2,75
Lombok Tengah	2,35	3,74	2,33	3,02	2,78	2,55
Lombok Timur	3,35	4,17	2,79	1,51	2,47	2,53
Sumbawa	2,99	4,01	3,39	2,11	2,79	2,67
Dompu	3,04	3,28	3,02	2,5	2,36	2,7
Bima	2,79	2,89	1,58	2,28	2,15	2,19
Sumbawa Barat	5,29	5,5	5,52	4,56	3,54	3,1
Lombok Utara	1,99	3,01	1,75	0,38	1,4	1,85
Kota Mataram	5,28	6,83	5,19	6,03	4,78	4,85
Kota Bima	4,06	4,42	3,56	3,73	3,57	3,27

Sumber : NTB Dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020-2024 cenderung mengalami penurunan dari tahu ke tahun di beberapa daerahnya. Namun pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka relatif lebih tinggi, seperti di kota mataram mencapai 6,83% dan kabupaten sumbawa barat sebesar 5,5%. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan orang banyak kehilangan pekerjaan dan terbatasnya lapangan pekerjaan.

Kemudian Pada tahun 2021-2022 TPT mengalami penurunan di beberapa daerah, seperti Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Lombok Utara, hal tersebut menunjukkan mulai adanya pemulihan aktivitas ekonomi pasca pandemi COVID-19. Namun pada beberapa daerah masih mengalami peningkatan, seperti di Lombok Barat dari 3,32% menjadi 4,16%, Lombok Tengah dari 2,33% menjadi 3,02%, Kabupaten Bima dari 1,58%, menjadi 2,28%, Kota Mataram dari 5,19% menjadi 6,03 dan Kota Bima dari 3,56% menjadi 3,73, hal tersebut

menunjukkan pemulihan ekonomi belum merata di semua daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Begitupun pada tahun 2023-2024 masih ada daerah yang masih mengalami peningkatan tingkat pengangguran terbuka seperti Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Utara, dan kota Mataram.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tabel 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020 - 2024

Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lombok Barat	67,89	70,48	71,69	74	76,21
Lombok Tengah	75,04	75,05	73,2	76,87	79,16
Lombok Timur	68,11	69,48	69,16	71,07	78,46
Sumbawa	69,11	66,86	72,08	71,17	73,8
Dompu	70,06	67,56	70,76	72,48	80,3
Bima	72,27	71,65	73,3	75,31	78
Sumbawa Barat	69,73	71,02	75,76	70,87	75,66
Lombok Utara	73,6	73,43	76,56	76,19	80,86
Kota Mataram	68,07	65,61	63,26	68,26	71,8
Kota Bima	74,24	75,46	69,8	78,09	73,21

Sumber : NTB Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data persentase tingkat partisipasi Angkatan kerja kabupaten/kota di provinsi nusa Tenggara barat tahun 2020-2024 di atas secara umum menunjukkan tren yang cenderung meningkat meskipun disertai fluktuasi pada beberapa waktu, yang mencerminkan adanya perbaikan partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Peningkatan ini terlihat jelas pada kabupaten Lombok Barat yang naik 67,89% menjadi 76,21%, Lombok Tengah yang relatif tinggi dan stabil dari 75,04% menjadi 79,16%, serta Lombok Timur yang mengalami lonjakan signifikan hingga 78,46% pada tahun 2024, sementara Kabupaten Dompu dan Lombok Utara bahkan mencatatkan tingkat partisipasi tertinggi masing-masing sebesar 80,3% dan 80,86%, yang mengindikasikan tingginya keterlibatan masyarakat dalam pasar kerja, meskipun kondisi tersebut tidak selalu mencerminkan kualitas pekerjaan yang baik. Di sisi lain, beberapa daerah seperti kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat menunjukkan pola fluktuatif yang mengakibatkan ketidakstabilan pasar kerja. Sedangkan kota Mataram cenderung memiliki TPAK lebih rendah dibandingkan wilayah lain meskipun meningkat dari 68,07% menjadi 71,8%, yang dapat dikaitkan dengan karakteristik wilayah perkotaan seperti tingginya angka pengangguran terlihat dari data tingkat pengangguran diatas. Serta kota Bima yang mengalami dinamika cukup tajam dengan dengan kenaikan hingga 78,09% pada tahun 2023 sebelum turun menjadi 73,21 pada tahun 2024, sehingga secara keseluruhan data ini menunjukkan bahwa peningkatan TPAK di NTB mencerminkan membaiknya aktivitas ekonomi dan dorongan kebutuhan ekonomi masyarakat untuk bekerja.

3. Jumlah Penduduk

Tabel 3. Jumlah penduduk Di NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020 - 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk (juta jiwa)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lombok Barat	721,5	731,8	744,3	753,6	765
Lombok Tengah	1.034,90	1.049,70	1.067,70	1.089,70	1.109,8
Lombok Timur	1.325,20	1.343,90	1.366,40	1.391,40	1.414,50
Sumbawa	509,8	517,8	527,6	529,5	536,6
Dompu	236,7	238,2	239,8	247,2	250,9
Bima	514,1	520,4	528	535,5	543,5
Sumbawa Barat	145,8	148,5	151,8	153	155,5
Lombok Utara	247,4	251,5	256,4	157,9	261,6
Kota Mataram	429,7	432	434,3	441,2	445
Kota Bima	155,1	156,2	157,4	161,4	163,6

Sumber : NTB Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data di atas Jumlah penduduk pada kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2024 secara umum menunjukkan cenderung mengalami peningkatan di hampir seluruh wilayahnya setiap tahun. Kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kabupaten Lombok Timur yang meningkat dari sekitar 1.325,2 ribu jiwa tahun 2020 menjadi 1.414,5 ribu jiwa di tahun 2024. Kemudian Kabupaten yang paling sedikit penduduknya jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain yaitu kabupaten Sumbawa Barat dengan jumlah penduduk 155,5 ribu jiwa pada tahun 2024, namun tetap mengalami peningkatan di setiap tahunnya seperti kabupaten/kota yang lain. Peningkatan tersebut kemungkinan disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang konsisten baik karena kelahiran ataupun migrasi masuk.

Namun ada 1 kabupaten yang mengalami penurunan jumlah penduduk pada tahun 2023 yaitu kabupaten Lombok Utara dari 256,4 ribu jiwa pada tahun 2022 turun menjadi 157,9 ribu jiwa pada tahun 2023, namun Kembali naik pada tahun 2024 menjadi 261,6 ribu jiwa. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh adanya kematian ataupun banyak orang migrasi ke luar kabupaten Lombok Utara.

4. Upah Minimum

Tabel 4. Upah Minimum Di Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020 - 2024

Kabupaten/Kota	Upah Minimum (Juta Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lombok Barat	2.184.425	2.184.425	2.184.425	2.373.194	2.444.067
Lombok Tengah	2.192.987	2.192.987	2.192.987	2.367.676	2.450.968
Lombok Timur	2.184.197	2.184.197	2.184.197	2.372.532	2.449.497
Sumbawa	2.278.710	2.278.710	2.278.710	2.474.712	2.650.862
Dompu	2.201.613	2.201.613	2.201.613	2.389.506	2.467.237
Bima	2.187.562	2.187.562	2.187.562	2.400.833	2.446.699
Sumbawa Barat	2.229.880	2.229.880	2.229.880	2.369.310	2.476.195

Lombok Utara	2.186.053	2.186.053	2.186.053	2.361.231	2.450.541
Kota Mataram	2.184.485	2.184.485	2.184.485	2.598.079	2.685.089
Kota Bima	2.225.000	2.225.000	2.225.000	2.425.030	2.500.206

Sumber : NTB Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data di atas upah minimum kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2024 cenderung tetap, tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 hampir di semua wilayahnya. Namun memasuki tahpada tahun 2023 mengalami kenaikan di semua wilayahnya. Yang dimana kota Mataram meningkat cukup signifikan jika di banding kabupaten/kota yang lain yang awalnya Rp 2.184.485 pada tahun 2020-2022 naik menjadi Rp 2.598.079 pada tahun 2023, Kembali naik pada tahun 2024 menjadi Rp 2.685.089.

Secara keseluruhan, daerah dengan upah minimum tertinggi adalah kota Mataram, diikuti oleh kabupaten Sumbawa dan kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan kabupaten yang tingkat upah minimum relatif lebih rendah terdapat di kabupaten Lombok Barat, dan Lombok Timur. Hal tersebut kemungkinan di sebabkan oleh wilayah perkotaan memiliki aktivitas ekonomi cenderung lebih tinggi jika di bandi wilayah yang lain. Kenaikan upah ataupun penurunan upah minimum ini pada dasarnya di tentukan oleh pemerintah berdasarkan oleh beberapa Faktor seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi ketenaga kerjaan.

5. Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 5. Indeks Pembangunan Manusia Di NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020 - 2024

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lombok Barat	68.03	70.23	70.64	71.44	72.18
Lombok Tengah	66.36	68.32	68.7	69.57	70.41
Lombok Timur	66.23	68.54	68.9	69.83	70.65
Sumbawa	67.6	69.43	69.82	70.71	71.68
Dompu	67.83	69.65	70.27	70.96	71.77
Bima	66.37	68.36	68.72	69.63	70.33
Sumbawa Barat	71.52	73.34	73.54	74.34	74.84
Lombok Utara	64.49	65.8	66.14	67.09	68.02
Kota Mataram	79.1	80.02	80.24	80.67	81.15
Kota Bima	75.8	76.74	77.03	77.75	78.24

Sumber : NTB Dalam Angka, 2024

Data indeks Pembangunan manusia kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2024 di atas cenderung meningkat secara konsisten di seluruh wilayah tanpa adanya penurunan. Hal ini menandakan bahwa kualitas Pembangunan manusia yang diukur melalui aspek Pendidikan, Kesehatan, dan standar hidup layak terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Secara rinci, kota Mataram memiliki nilai IPM tertinggi, meningkat dari 79,1 tahun 2020 menjadi 81,15 tahun 2024 yang menunjukkan kategori Pembangunan manusia yang mencerminkan keunggulan wilayah perkotaan dalam akses Pendidikan, layanan Kesehatan, dan ekonomi. Diikuti oleh kota Bima yang juga relative tinggi, dari 75,8 menjadi 78,24.

Sementara itu, kabupaten Sumbaa Barat merupakan daerah Dengan IPM tertinggi di tingkat kabupaten, meningkat dari 71,52 menjadi 74,84. Untuk wilayah lain seperti Lombok barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, dan Bima, seluruhnya menunjukkan peningkatan bertahap. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, meskipun masih berada pada kategori menengah dibandingkan wilayah kota. Di sisilain kabupaten Lombok Utara memiliki IPM terrendah, namun tetap mengalami peningkatan dari 64,49 tahun 2020 menjadi 68,02 tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun tertinggal, wilayah tersebut tetap mengalami kemajuan dalam Pembangunan manusia.

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa IPM di NTB mengalami peningkatan yang stabil di seluruh kabupaten/kota. Kondisi ini menandakan keberhasilan Pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi yang semakin membaik, meskipun masih terdapat kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Pemilihan Model Data Panel Melalui Uji Spesifikasi Model

1. Uji Chow

Uji *Chow* digunakan untuk mengetahui apakah model *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM) yang paling tepat untuk digunakan. Dalam penelitian ini nilai signifikansi yang digunakan yaitu 5% atau $\alpha = 0,05$. Hipotesis yang terbentuk dalam uji chow yaitu sebagai berikut:

H_0 : menggunakan model *common effect*

H_1 : menggunakan model *fixed effect*

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan *software Eviews 12* (lampiran 3) diketahui nilai *Probability cross-section F* sebesar 0.002, dimana nilai ini lebih kecil dari nilai taraf nyata (α) sebesar 0,05, berarti model yang dipilih adalah *Fixed Effect*.

2. Uji Husman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model yang terbaik antara *Random Effect* atau *Fixed Effect* yang akan dipakai untuk estimasi model yang digunakan. Dalam penelitian ini nilai signifikansi yang digunakan yaitu 5% atau $\alpha = 0,05$. Hipotesis yang terbentuk dalam uji hausman yaitu sebagai berikut:

H_0 : menggunakan model *random effect*

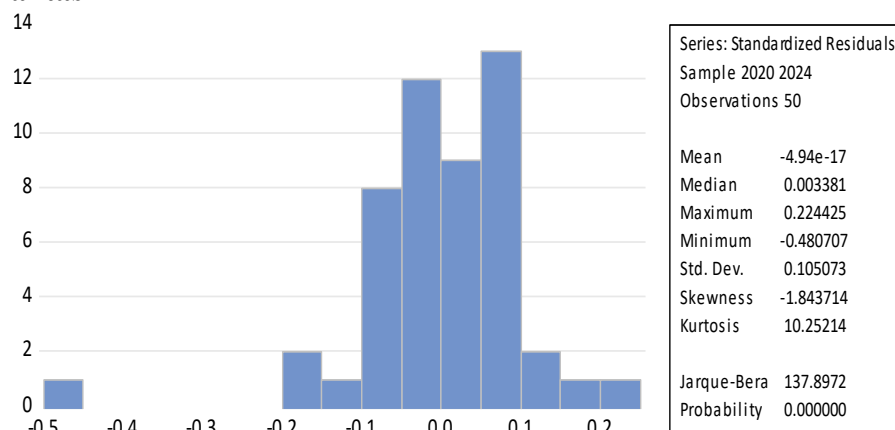
H_1 : menggunakan model *fixed effect*

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan *software Eviews 12* diketahui nilai *Probability cross-section random* sebesar 0,0013, dimana nilai ini lebih kecil dari nilai taraf nyata (α) sebesar 0,05, berarti model yang dipilih adalah *Fixed Effect*.

Oleh karena kedua uji, baik uji Chow dan Hausman sudah menentukan model regresi data panel adalah model *Fixed Effect*, maka uji *Lagrange Multiplier* (LM) tidak perlu dilakukan.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



Gambar 1. Grafik atau Diagram Batang Dalam Uji Normalitas

Sumber : Data Sekunder Diolah

Berdasarkan tabel di atas maka didapatkan hasil bahwa nilai statistik Jarque-Bera sebesar 137,8972 dengan nilai probabilitas sebesar 0.000000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearita

Tabel 6. Nilai Koefisien Korelasi Dari TPAK, Jumlah Penduduk, Upah Minimum Dan Indeks Pembangunan Manusia

	X1	X2	X3	X4
X1	1	-0.0651780...	0.41487706...	-0.2334317...
X2	-0.0651780...	1	-0.0352967...	-0.3426785...
X3	0.41487706...	-0.0352967...	1	0.35253680...
X4	-0.2334317...	-0.3426785...	0.35253680...	1

Sumber : Data Sekunder Diolah

Berdasarkan tabel di atas maka didapatkan hasil bahwa tidak ada nilai korelasi yang lebih dari 0,80, artinya data tersebut terbebas dari gejala multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan dalam melihat ada tidaknya permasalahan heteroskedastisitas ini, salah satunya adalah uji glejser. Kriteria pengujian sebagai berikut (Gujarati, 2006 dalam Side & Nurfitriah, 2019):

- H_0 : tidak ada gejala heteroskedastisitas, jika nilai probabilitas variabel bebas $> 0,05$
- H_1 : ada gejala heteroskedastisitas, jika nilai probabilitas variabel bebas $< 0,05$.

Dibawah ini disajikan nilai probabilitas dari variabel tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah penduduk, upah minimum dan indeks pembangunan manusia, sebagai berikut :

Tabel 7. Nilai Probabilitas Dari Variabel TPAK, Jumlah Penduduk, Upah Minimum Dan Indeks Pembangunan Manusia

No.	Variabel	Probabilita
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Jumlah Penduduk	0,3531
2.	Jumlah Tenaga Kerja	0,7814
3.	Indeks Pembangunan Manusia	0,3900
4.		0,3726

Sumber : Data Sekunder Diolah

Berdasarkan tabel 7, diketahui nilai probabilita variabel tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah penduduk, upah minimum dan indeks pembangunan manusia lebih besar dari 0,05, maka model yang digunakan lolos uji heteroskedastisitas.

Model Regresi Estimasi Terpilih

Tabel 8. Nilai Konstanta dan Koefisien Dari Variabel TPAK, Jumlah Penduduk, Upah Minimum Dan Indeks Pembangunan Manusia

No.	Keterangan	Probabilita
1.	Konstanta	15,8345
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Jumlah Penduduk	0,546167
3.	Upah Minimum	17,157374
4.	Indeks Pembangunan Manusia	2,325141
5.		-7,501198

Sumber : Data Sekunder Diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 15,8345 + 0,54611X_1 + 17,15737X_2 + 2,32514X_3 - 7,50119X_4$$

Dari persamaan regresi data panel diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai konstanta sebesar memiliki arti jika variabel tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah penduduk, upah minimum dan indeks pembangunan manusia bernilai 0 (nol), maka tingkat pengangguran terbuka di NTB sebesar 15,8345%.
- Nilai koefisien X_1 (tingkat partisipasi angkatan kerja) sebesar 0,54616, artinya apabila variabel tingkat partisipasi angkatan kerja naik sebesar 1 persen maka tingkat pengangguran terbuka (Y) meningkat sebesar 0,54616 persen dengan asumsi jumlah penduduk, upah minimum dan indeks pembangunan manusia konstan.
- Nilai koefisien X_2 (jumlah penduduk) sebesar 17,15737 artinya apabila variabel jumlah penduduk naik sebesar 1 jiwa maka tingkat pengangguran terbuka (Y) naik sebesar 17,15737 persen dengan asumsi tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum dan indeks pembangunan manusia konstan.
- Nilai koefisien X_3 (upah minimum) sebesar 2,32514, artinya apabila upah minimum naik sebesar 1 rupiah maka tingkat pengangguran terbuka (Y) naik sebesar 2,32514 persen

dengan asumsi tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia konstan.

- e. Nilai koefisien X_4 (IPM) sebesar -7,50119 artinya apabila variabel IPM naik sebesar 1 persen maka tingkat pengangguran terbuka (Y) turun sebesar 7,50119 persen dengan asumsi tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah penduduk dan upah minimum konstan

Uji Hipotesis

1. Uji Z (Uji Signifikansi Secara Parsial)

Uji statistik Z digunakan karena jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 60 yang termasuk dalam sampel besar ($n > 30$). Uji Z juga digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial variabel tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah penduduk, upah minimum dan indeks pembangunan manusia terhadap variabel tingkat

- Jika $-Z_{\alpha/2} \leq Z_h \leq Z_{\alpha/2}$ atau nilai probabilitas Z masing-masing variabel bebas lebih besar dari taraf nyata 0,05 maka H_0 terima yang berarti secara parsial tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah penduduk, upah minimum dan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di NTB tahun 2020 - 2024.
- Jika $Z_h > Z_{\alpha/2}$ atau $Z_h < -Z_{\alpha/2}$ atau nilai probabilitas Z masing-masing variabel bebas lebih kecil dari taraf nyata 0,05 maka H_0 tolak yang berarti secara parsial tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah penduduk, upah minimum dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di NTB tahun 2020 - 2024.

Dengan uji dua, maka tingkat keyakinan menjadi $\alpha/2$ atau $0,05/2 = 0,025$, sehingga berdasarkan tabel Z, nilai $Z_{\alpha/2}$ atau $Z_{0,05/2}$ atau $Z_{0,025} = \pm 1,96$. Adapun nilai Z Statistik dan probabilitas Z dari masing-masing variabel bebas, sebagai berikut:

Tabel 9. Nilai Z-Statistik dan Nilai Probabilitas Dari Variabel TPAK, Jumlah Penduduk, Upah Minimum Dan Indeks Pembangunan Manusia

No.	Variabel	Nilai Z Statistik	Probabilitas	Keterangan
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan	0,343804	0,7330	Tidak Signifikan
2.	Jumlah Penduduk	2,810833	0,0079	Signifikan
3.	Upah Minimum Kabupaten	1,690383	0,0996	Tidak Signifikan
4.	Indeks Pembangunan Manusia	-0,857746	0,3987	Tidak Signifikan

Sumber: Data Sekunder Olah

Berdasarkan tabel 9. diketahui bahwa nilai Z statistik dari variabel tingkat partisipasi angkatan, upah minimum dan indeks pembangunan manusia lebih kecil dari nilai Z tabel sebesar $\pm 1,96$ atau nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$, maka secara parsial pengaruh tingkat partisipasi angkatan, upah minimum dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka tidak signifikan. Sedangkan nilai Z statistik dari variabel jumlah penduduk lebih besar dari nilai Z tabel sebesar $\pm 1,96$ atau nilai probabilitasnya lebih kecil atau sama dengan nilai $\alpha = 0,05$, maka secara parsial jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

2. Uji F (Uji Signifikansi Secara Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan dan jumlah penduduk sebagai variabel independen terhadap tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen secara simultan. Adapun kriteria keputusan, sebagai berikut :

- a. Jika $F_h \leq F_{\alpha, v_1, v_2}$ atau nilai probabilitas F lebih besar dari taraf nyata 0,05 maka H_0 terima yang berarti secara simultan tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah penduduk, upah minimum dan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di NTB tahun 2019 - 2024.
- b. Jika $F_h > F_{\alpha, v_1, v_2}$ atau nilai probabilitas F lebih kecil dari taraf nyata 0,05 maka H_0 tolak yang berarti secara simultan tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah penduduk, upah minimum dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di NTB tahun 2019 - 2024.

Dengan taraf nyata (α) sebesar 0,05 dan derajat bebas (*degree of freedom*), $v_1 = k = 4$ dan $v_2 = n - (k + 1) = 60 - (4 + 1) = 60 - 5 = 55$, maka dengan melihat tabel distribusi F nilai $F_{0,05;4;56} = 2,58$.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan *software Eviews 10* (lampiran 5), diketahui bahwa nilai F statistik sebesar 7,506346 lebih besar dari nilai F tabel 2,58 dan nilai probabilitas Z sebesar 0,000001 lebih kecil dari nilai taraf nyata (α) sebesar 0,05, maka secara simultan tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah penduduk, upah minimum dan indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di NTB Tahun 2020 - 2024.

3. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi (R^2) mencerminkan kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Nilai R^2 berada pada rentang antara nol hingga satu. Nilai R^2 yang rendah mengindikasikan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen masih terbatas, sedangkan nilai R^2 yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen mampu memberikan sebagian besar informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan *software Eviews 12*, diketahui bahwa nilai R^2 sebesar 0,730504 (73 persen). Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh dari tingkat partisipasi angkatan kerja, jumlah penduduk, upah minimum dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka sebesar 73 persen. Sedangkan 27 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka

Berdasarkan hasil estimasi, Tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif serta tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di provinsi Nusa Tenggara Barat. Artinya setiap peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 1 persen maka akan menaikkan tingkat pengangguran terbuka 0,48 persen. Dengan demikian TPAK di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2024 tidak adanya pengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap pengangguran terbuka.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan teori Todaro & Smith, (2006) yang berpendapat bahwa peningkatan jumlah Angkatan kerja mencerminkan meningkatnya penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Apabila peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan maka dapat meningkatkan tingkat pengangguran. Hal ini umum terjadi di beberapa negara berkembang dimana peningkatan jumlah angkatan kerja lebih cepat dibandingkan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Dengan demikian hubungan positif antara TPAK dengan TPT dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Selain itu dalam search theory yang dikemukakan oleh Pissarides pengangguran terjadi karena adanya proses pencocokan antara pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang membutuhkan waktu. Pissarides berpendapat bahwa peningkatan jumlah Angkatan kerja tidak disertai diikuti oleh penyerapan tenaga kerja secara langsung karena adanya ketidaksesuaian keterampilan dan keterbatasan informasi di pasar kerja. Hal ini menyebabkan Sebagian tenaga kerja berada dalam kondisi pengangguran sementara, sehingga hubungan antara TPAK dengan TPT tidak selalu signifikan (Pissarides, 2010).

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Anggraini et al., (2025) yang menemukan bahwa TPAK tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah Angkatan kerja tidak selalu berdampak nyata terhadap perubahan tingkat pengangguran. Selanjutnya penelitian oleh Munawir, (2020) juga menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang kausal antara TPAK dengan tingkat pengangguran terbuka. Penelitian ini memperkuat bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut cenderung lemah dan tidak signifikan secara statistik. Dengan kata lain perubahan dalam TPAK tidak secara langsung menyebabkan perubahan tingkat pengangguran. Hal ini menunjukkan bukan determinan utama dalam menjelaskan fluktuatif pengangguran.

Pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka.

Dari hasil estimasi ditemukan bahwa secara parsial jumlah penduduk berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan 1 jiwa orang akan menaikkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 17,15 persen.

Hasil penelitian tersebut didukung oleh teori Malthus yang menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja akan menyebabkan kelebihan tenaga kerja yang tidak terserap sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran. Hal ini sejalan dengan teori pasar tenaga kerja yang menyatakan bahwa pengangguran terjadi akibat ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. (Achmad Ainul Ghazali, 2024).

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rangga & Lestari, (2019) dengan menggunakan metode regresi yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan jumlah pengangguran karena tidak seluruh tenaga kerja dapat terserap di pasar tenaga kerja. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Putri et al, (2023) yang menggunakan

pendekatan ekonometrika menemukan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan tekanan pada pasar tenaga kerja, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya pengangguran apabila tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka

Berdasarkan hasil penelitian nilai koefisien regresi untuk variabel upah minimum secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Artinya apabila upah minimum naik sebesar 1 rupiah maka tingkat pengangguran terbuka (Y) naik sebesar 2.32514 persen.

Teori neoklasik menjelaskan bahwa pasar tenaga kerja ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Dalam kondisi keseimbangan upah terbentuk secara alami. Namun Ketika pemerintah menetapkan upah minimum di atas tingkat keseimbangan maka akan terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja yang berujung pada peningkatan pengangguran (Hennigusnia, S.T. et al., 2024). Berdasarkan teori ini, hubungan antara upah minimum dengan pengangguran secara konseptual bersifat positif sebagaimana hasil penelitian ini yang di peroleh.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (U. Sulia Sukmawati, et al., (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh upah minimum terhadap pengangguran tidak konsisten di setiap daerahnya. Di beberapa wilayah, kenaikan upah minimum diikuti oleh peningkatan tingkat pengangguran, namun di daerah lain tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik ekonomi daerah, seperti struktur industri, tingkat investasi, dan kualitas tenaga kerja sangat menentukan kuat dan lemahnya pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran. Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung bahwa pengaruh upah minimum bisa bersifat positif tetapi tidak signifikan.

Pengaruh indeks Pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka

Berdasarkan hasil estimasi disimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka.. Artinya apabila variabel IPM naik sebesar 1 point atau indeks maka tingkat Pengangguran terbuka (Y) turun sebesar 7.50119 persen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pembangunan ekonomi oleh Todaro, dan Smith (2012) dalam buku *Economic Development*. Dalam teori tersebut menjelaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Kesehatan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga memperbesar peluang untuk mendapat pekerjaan. Dengan kata lain, semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin besar kemungkinan tenaga kerja untuk terserap dalam pasar kerja, sehingga tingkat pengangguran akan menurun.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Agustin et al., (2024) yang menemukan bahwa Ipm tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat pengangguran terbuka. Penelitian ini menunjukkan kualitas Pendidikan, dan Kesehatan tidak serta merta mampu menurunkan tingkat pengangguran. Hal ini dapat terjadi karena meskipun

kualitas sumber daya manusia meningkat, tidak secara langsung mampu menekan angka pengangguran. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.

Pengaruh secara simultan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja, jumlah penduduk, upah minimum, dan Indeks Pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka

Berdasarkan hasil penelitian secara simultan tingkat partisipasi Angkatan kerja, jumlah penduduk, upah minimum, dan indeks Pembangunan manusia, berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu tingkat pengangguran terbuka. Dan nilai R-square pada hasil regresi dari penelitian ini yaitu sebesar 0,63 atau 63%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi Angkatan kerja, jumlah penduduk, upah minimum, dan indeks Pembangunan manusia, memiliki pengaruh 63% terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2024..

Menurut teori tenaga kerja, pengangguran terjadi akibat ketidak seimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan kesempatan kerja yang ada. Dalam prespektif ini, faktor-faktor seperti jumlah penduduk, dan TPAK mencerminkan sisi penawaran tenaga kerja, sedangkan upah minimum, dan kualitas sumber daya manusia yang di wakili oleh IPM mencerminkan kondisi pasar kerja dan produktivitas tenaga kerja.

Menurut Todaro, dan Smith (2012) pengangguran di negara berkembang terjadi akibat ketidakseimbangan antara pertumbuhan tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan kerja serta ketidaksesuaian antara kemampuan tenaga kerja dengan yang dibutuhkan pasar kerja.. Dimana kualitas tenaga kerja yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan pasar kerja sehingga banyak tenaga kerja tidak terserap yang menyebabkan pengangguran. Selain itu peningkatan upah juga menyebabkan perusahaan membatasi jumlah tenaga kerja yang di serap sehingga memicu pengangguran.

Jadi penelitian pada ini secara simultan tingkat partisipasi Angkatan kerja, jumlah penduduk, upah minimum, dan indeks Pembangunan manusia, memiliki pengaruh 63% terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2024, dan 37% di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), jumlah penduduk, upah minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020–2024 menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, sedangkan TPAK, upah minimum, dan IPM tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dengan kemampuan model menjelaskan variasi TPT sebesar 73 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa dinamika pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil interaksi berbagai aspek demografi, ketenagakerjaan, kebijakan pengupahan, dan pembangunan manusia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan empat variabel independen dengan periode pengamatan lima tahun sehingga belum mampu menjelaskan seluruh faktor yang memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka. Variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, struktur sektor ekonomi, tingkat pendidikan, inflasi, dan kualitas penciptaan lapangan kerja belum dianalisis. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel-variabel tersebut, memperpanjang periode observasi, serta menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang berorientasi pada peningkatan penciptaan lapangan kerja, pengendalian pertumbuhan angkatan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan investasi produktif untuk menekan tingkat pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

REFERENCES

- Abdianti, D., & Martilova, N. (2024). Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum provinsi terhadap pengangguran di Sumatera Barat. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(4), 270–286. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i4.3132>
- Agustin, E. F., Haliza, S. N., Kerja, J. A., & Investasi, T. (2024). Analisis pengaruh IPM, jumlah angkatan kerja, AHH, dan tingkat investasi terhadap tingkat pengangguran di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi*, 5(1), 187–191.
- Anggraini, Y., Armida, S., & Universitas Negeri Padang. (2025). Pengaruh jumlah penduduk, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap pengangguran di Sumatera Barat tahun 2020–2024. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 9, 39109–39119.
- Anonim. (2024). *Nusa Tenggara Barat dalam angka 2024*. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Basuki, A. T. (2017). *Pengantar ekonometrika (Dilengkapi penggunaan EViews)*. Danisa Media.
- Firda Auliyah Anggraeni. (2023). *Pengaruh jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur tahun 2011–2020* (Skripsi).
- Ghozali. (2023). *Partial least squares: Konsep, teknik, dan aplikasi*.
- Hennigusnia, S. T., Suryono, I. L., Kurniawati, A., & Gunawan, B. T. (2024). *Upah minimum di Indonesia* (W. Yuliani, Ed.). CV Bravo Press Indonesia.
- Kolkman, R., & Blackburn, S. (2014). Sulung. *Tribal Architecture in Northeast India*, 5(September), 121–125. https://doi.org/10.1163/9789004263925_015
- Munawir, S. (2020). Pengaruh partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap PDRB di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi*, 12, 10–18.

- Nawawi, H. (2015). *Metode penelitian bidang sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Pissarides, C. A. (2010). Equilibrium in the labour market with search frictions. *Review of Economic Studies*.
- Prawoto, N., & Sisnita, A. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung periode 2009–2015. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 1(1), 1–7.
- Purba, A. A., Siregar, H. M., Aruan, N. I. M., & Tampubolon, K. A. (2024). Pengaruh jumlah penduduk dan inflasi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), 7781–7789.
- Putri, N. A., Trisniarti, N., & Husein, R. (2023). Pengaruh jumlah penduduk, pengangguran terbuka, dan upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1991–2022. *Jurnal Ekonomi*, 2(1), 1–13.
- Qamariyah, N., et al. (2022). Analisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka menggunakan regresi probit dan logit. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, dan Aplikasinya*, 2, 344–353.
- Pramudjasi, R., & Lestari, D. (2019). Pengaruh jumlah penduduk dan pendidikan serta upah terhadap pengangguran di Kabupaten Paser. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 16(1), 69–77.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. KBM Indonesia.
- Salsabila, A. H., Rahmatillah, A. E., Arwansa, D., & Siti, M. (2025). Dampak upah minimum, IPM, dan partisipasi angkatan kerja terhadap pengangguran: Analisis data panel lima kabupaten Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi*, 5(1), 245–260.
- Side, S., & Nurfitriah, R. (2019). Analisis regresi panel pada pemodelan tingkat kematian bayi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Mathematics, Computations, and Statistics*, 2(2), 115–125.
- Sudjono. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic development* (11th ed.). Pearson Education.
- Waruwu, M., Pu'at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. W. (2025). Metode penelitian kuantitatif: Konsep, jenis, tahapan, dan kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>
- Widarjo, A. (2009). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya* (3rd ed.).